

# SKRIPSI

## ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Studi Tahun 2018-2022)

disusun dan diajukan oleh

**MARCOPOLO**

**A031201064**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Studi Tahun 2018-2022)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MARCOPOLO**

**A031201064**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Studi Tahun 2018-2022)

disusun dan diajukan oleh

MARCOPOLO  
A031201064

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 14 Mei 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 19650731 199103 2 002

Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CPA  
NIP 19641012 198910 1 001



Ketua Departemen Akuntansi  
Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.  
NIP 19650307 199403 1 003



# SKRIPSI

## ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Studi Tahun 2018-2022)

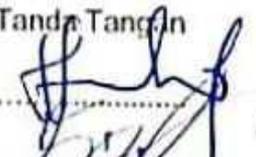
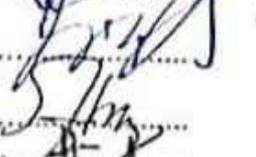
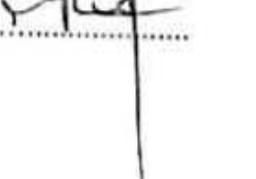
dusun dan diajukan oleh

**MARCOPOLO**

**A031201064**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 30 Mei 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Hafiah, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP.	Ketua	
2	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si	Anggota	
4	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin


Dr. H. Saifuluddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.  
NIP. 19650307 199403 1 00



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Marcopolo  
NIM : A031201064  
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (Studi Tahun 2018-2022)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

  
METERAS TEMPEL  
150ALX188760913  
Marcopolo



## PRAKATA

“Memang baik menjadi orang benar, tapi lebih benar menjadi orang baik”

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Profinsi Sulawesi Selatan (Studi Tahun 2018-2022)”** dengan baik pada batas waktu yang ditentukan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Strata Satu (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Alm. Muh.Wielty Iterson dan Ibunda Tenri Abeng yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, perhatian, kasih sayang dan doa untuk kelancaran dan kesuksesan anaknya; saudara dan saudari peneliti yaitu Fauzan, Reyhan, Anisa, Geby, dan Marshan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.
2. Dosen Pembimbing I, Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., Ak.,CA.,CRA.,CRP. dan dosen pembimbing II, Bapak Dr. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA., yang telah meluangkan banyak waktu, saran dan arahan kepada peneliti untuk usun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.



3. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA. selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si., CA., AseanCPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sekaligus dosen Pembimbing Akademik.
4. Para dosen Akuntansi di Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan banyak pelajaran terkait dengan ilmu akuntansi selama masa perkuliahan.
5. Para pegawai akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan staf Akademik Departemen Akuntansi, yang telah membantu peneliti dalam hal kepengurusan berkas terkait perkuliahan, ujian proposal, ujian komprehensif dan ujian skripsi.
6. Sahabat "CIRCLE HALAL": Tina, Rizal, Yohan, Ainun, Kevin T, Jayanto, Kenji, Tirta, Danti, Batara, Indah, yang telah memberikan semangat, masukan, serta selalu ada dalam keadaan suka maupun duka, sehingga peneliti merasa sangat terbantu. Selain itu, selalu setia menjadi pendengar atas segala keluhan kesah peneliti selama menyusun skripsi ini.
7. Teman seperjuangan "Koko CS": Farel, Kepin, Koko, Yusran, Faree yang telah menjadi teman peneliti selama menempuh perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
8. Teman Seperbimbingan yaitu Leony dan Karin; Teman KKN yaitu Nunu dan Lily; Teman Akuntansi yang lain yaitu Venska, Dila, Nia, Chinta dan Fadia; dan Teman SMA yaitu Darip, Riswal, dan lin.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



lis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata a, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan

oleh keterbatasan penulis. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menerima segala kritik dan saran yang akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik.

Akhir kata, peneliti mendoakan semoga Allah SWT. membalas setiap bantuan dan bimbingan yang diberikan dengan berlipat ganda, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, 30 Mei 2024

Peneliti



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

### ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (Studi Tahun 2018-2022)

### *FLYPAPER EFFECT* ANALYSIS OF REGIONAL EXPENDITURE IN SOUTH SULAWESI (Study of 2018-2022)

Marcopolo  
Haliah  
Amiruddin

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, SiLPA, dan kapasitas fiskal terhadap belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis apakah terjadi *flypaper effect* di pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Objek dalam penelitian ini 21 kabupaten dan 3 kota di Sulawesi Selatan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan kapasitas fiskal memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga menunjukkan terjadinya *flypaper effect* pada pengelolaan belanja daerah di kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun.

**Kata kunci:** belanja daerah, PAD, DAU, SiLPA, kapasitas fiskal, *flypaper effect*

*This study aims to examine the effect of PAD, DAU, SiLPA, and fiscal capacity on regional spending. In addition, this study also analyzes whether there is a flypaper effect in the local government of South Sulawesi province. The data used in this study are secondary data published by the Supreme Audit Agency. The objects in this study were 21 districts and 3 cities in South Sulawesi. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that PAD, DAU, and fiscal capacity have an influence on regional spending, while SiLPA has no effect on regional spending. This study also shows the flypaper effect on the management of regional expenditure in districts and cities in South Sulawesi province for five years.*

**Keywords:** regional spending, PAD, DAU, SiLPA, fiscal capacity, *flypaper effect*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 <i>Agency Theory</i> (Teori Agensi) .....	9
2.1.2 Otonomi Daerah .....	10
2.1.3 Belanja Daerah.....	10
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.1.5 Dana Alokasi Umum .....	12
2.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	13
2.1.7 Kapasitas Fiskal.....	14
2.1.8 <i>Flypaper effect</i> .....	14
2.2 Penelitian Terdahulu .....	15
Kerangka Konseptual.....	18
Hipotesis Penelitian .....	19



2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah...	20
2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.....	21
2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah.....	22
2.4.4 Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Daerah .....	23
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	25
2.4.5 Analisis <i>Flypaper effect</i> terhadap Belanja Daerah.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Populasi dan Sampel.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.4.1 Jenis Data.....	28
3.4.2 Sumber Data .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	29
3.6.1 Variabel Penelitian.....	29
3.6.2 Definisi Operasional.....	29
3.7 Teknik Analisis Data .....	32
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	32
3.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	32
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	34
3.7.4 Uji Hipotesis.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Deskripsi dan Objek Penelitian .....	36
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	36
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	38
4.3.1 Uji Normalitas .....	38
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	39
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	40
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda Data Panel .....	41
4.5 Uji Hipotesis.....	43
4.5.1 Uji Signifikan Parsial (Uji T) .....	43
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	46
Pembahasan .....	46



4.6.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah .....	46
4.6.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah .....	47
4.6.3 Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Daerah.....	48
4.6.4 Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Daerah .....	49
2.4.6 Analisis <i>Flypaper effect</i> terhadap Belanja Daerah.....	51
BAB V PENUTUP .....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN .....	58



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1	Populasi dan Sampel ..... 28
3.2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah ..... 31
4.1	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif ..... 36
4.2	Hasil Uji Normalitas ..... 39
4.3	Hasil Uji Multikolinearitas ..... 40
4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas ..... 41
4.5	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda ..... 41
4.6	Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T) ..... 43
4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) ..... 45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	19



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata.....	58
2 Data Variabel Penelitian.....	59



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era reformasi membawa perubahan dalam kebijakan pemerintahan di Indonesia dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2001. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah, dengan adanya otonomi daerah diharapkan kebutuhan daerah akan lebih terpenuhi karena pendataan kebutuhan lebih dekat dengan masyarakat sehingga pemerintah lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh daerahnya sehingga tercapailah apa yang menjadi tujuan otonomi tersebut yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (Agussalim dkk. 2022)

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebijakan desentralisasi fiskal ingin mendorong kemandirian daerah melalui potensi-potensi yang ada. Dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah menyusun rencana kegiatan pendapatan dan belanja daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut UU No. 23/2014 APBD adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah



ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan dari perancangan APBD yaitu agar pemerintah daerah bisa memperkirakan berapa total pendapatan yang akan diterima dan total pengeluaran yang akan dibelanjakan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam era otonomi daerah harus terkait dengan adanya pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Bentuk pelayanan publik dapat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan hukum, infrastruktur, pariwisata dan kebudayaan, lingkungan hidup, pelayanan sosial, dan pelayanan lain yang dibutuhkan masyarakat. Dalam menyediakan layanan publik, maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran yang disebut Belanja Daerah.

Perencanaan anggaran dalam bentuk pendapatan dan belanja pemerintah untuk satu tahun anggaran dicantumkan dalam APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13/2006 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59/2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21/2011 menyatakan bahwa struktur APBD memiliki tiga komponen. Pertama, pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer yang terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, Belanja Daerah yang dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Ketiga, Sumber Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Salah satu komponen penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.



Pemerintah daerah sampai saat ini mayoritas secara konsisten masih bergantung pada dana suntikan dari pemerintah pusat, yang disebut juga sebagai dana perimbangan atau dana transfer. Pemberian dana suntikan ini ditujukan untuk mengubah dari eksternalisasi fiskal menjadi internalisasi fiskal, serta perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi inefisiensi fiskal antar daerah (Oates, 1999). Kebutuhan akan layanan publik untuk setiap daerah tentu berbeda, pemerintah akan melakukan pengeluaran untuk memenuhi dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan terhadap publik. Namun, permasalahannya adalah pemerintah daerah terlanjur bergantung pada DAU dalam membantu membiayai pembangunan dan belanja modal tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya (Rafi & Arza, 2023).

Ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih besar berasal dari transfer atau secara spesifiknya pada transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) yaitu DAU daripada PAD maka akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah (Agussalim dkk. 2022). Pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. DAU dan PAD diharapkan bisa saling substitusi, namun dalam kenyataannya tidak. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, justru semakin bergantung pada pemerintah pusat. Pernyataan ini sesuai dengan Oates (1999) yang menyatakan bahwa ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *Flypaper effect*.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 menunjukkan rata-rata



realisasi PAD sebesar Rp210,807 juta, rata-rata nilai realisasi Dana Anggaran sebesar Rp1,017,020 juta, rata-rata nilai realisasi SiLPA sebesar

Rp91,080 juta, dan rata-rata nilai realisasi belanja daerah sebesar Rp1,389,547 juta. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata kabupaten/kota di Sulawesi Selatan lebih banyak membiayai belanja daerah dari transfer pemerintah pusat dibandingkan PAD, hal ini merupakan indikasi adanya *flypaper effect*. Perlu adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk mengatasi *flypaper effect* (Mukhtaruddin dkk. 2023). Peningkatan kapasitas fiskal dilakukan dengan cara meningkatkan potensi sumber-sumber PAD untuk mengimbangi efektivitas transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memicu pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. Kapasitas fiskal daerah ini menjadi salah satu faktor penentu di suatu daerah terjadi atau tidaknya fenomena *flypaper effect* pada penggunaan belanja daerah, selain melihat respon DAU yang lebih besar dari PAD. Berdasarkan PMK No. 193/PMK.07/2022, kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki rata-rata kategori kapasitas fiskal daerah yang rendah. Apabila kapasitas suatu kabupaten/kota masuk dalam kategori rendah atau sangat rendah dan respon penggunaan Belanja Daerah lebih besar DAU daripada PAD, maka kabupaten/kota tersebut terindikasi mengalami fenomena *flypaper effect* pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Penelitian mengenai *flypaper effect* telah banyak dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat kondisi dimana Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh dana transfer dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah, yang dalam hal ini dikatakan terjadi fenomena *flypaper effect*. Pada penelitian-penelitian

nya yang dilakukan oleh Oktavianti (2022), Susan dkk. (2023), dan dkk. (2022) menemukan adanya *flypaper effect* pada pengelolaan



keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota yang diteliti. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang lebih besar terhadap dana transfer dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri. Namun, terdapat hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rafi dan Azra (2023), Agussalim dkk. (2022), dan Linawati (2019) yang tidak menemukan hasil adanya fenomena *flypaper effect* pada belanja pemerintah daerah di kabupaten/kota yang diteliti, karena pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh DAU. Berdasarkan penelitian terdahulu hal tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk setiap daerah lainnya atau seluruh Indonesia. Ini dikarenakan terdapat perbedaan setiap daerah yang dilihat dari segi karakteristik baik geografis, kondisi ekonomi, begitupun dengan kehidupan masyarakatnya. Hal ini yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, tahun pengamatan, populasi dan sampel.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi yang dilakukan oleh Rafi dan Azra (2023) yang berjudul “Analisis *Flypaper effect* pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat”. Variabel dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, SiLPA sebagai variabel independen serta belanja daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana peneliti memutuskan untuk menambahkan kapasitas fiskal sebagai variabel independen. Kapasitas fiskal kemungkinan akan memengaruhi fenomena *flypaper effect* pada pengelolaan daerah, khususnya pada belanja daerah. (Mukhtaruddin dkk. 2023)



Penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap adakah faktor dasar pada fenomena *flypaper effect* pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan karena banyaknya daerah yang semakin bergantung pada dana transfer daripada pendapatan asli daerahnya, sehingga terjadi *flypaper effect* yang menyebabkan stigma negatif pemerintah daerah, sehingga perlu dikaji ulang secara komprehensif agar pemerintah daerah bisa memperbaiki kedepannya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022?
3. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022?
4. Apakah kapasitas fiskal berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022?
5. Apakah *flypaper effect* terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2018-2022?



### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022
2. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022
3. Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap belanja pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022
4. Pengaruh kapasitas fiskal terhadap belanja pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022
5. Terjadi atau tidaknya fenomena *flypaper effect* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2018-2022

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan melalui penerapan ilmu yang didapat dari pembelajaran selama perkuliahan terhadap permasalahan nyata yang terjadi. membantu dalam meningkatkan kapasitas serta pengalaman peneliti yang berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam pengembangan penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.



### 3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran belanja. Karena, dalam menyusun anggaran belanja pemerintah daerah diupayakan dapat menghindari *flypaper effect*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Teori agensi didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain. Dalam penerapan teori ini, agen akan menggunakan wewenangnya untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan mandat atau perintah dari prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Halim (2012) penggunaan teori keagenan pada sektor publik diidentifikasi jika eksekutif merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada agen dan legislatif yang menjalankan wewenang dan mengambil keputusan dari prinsipal. Legislatif merupakan wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori agensi, jika dihubungkan antara terjadinya *flypaper effect* dan belanja daerah pada pemerintah daerah disuatu waktu tertentu, maka dapat diidentifikasi bahwa masyarakat sebagai prinsipal memberikan kepercayaan kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk memaksimalkan sumber daya atau potensi daerah. Agar dapat membawa hasil bagi kemandirian daerahnya masing-masing, dan pemerintah pusat memberikan transfer dana perimbangan antara masing-masing daerah kepada pemerintah daerah sesuai dengan harapan di

ing akan datang.



### 2.1.2 Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjelaskan, Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah oleh pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pelaksanaan otonomi di daerah, diharapkan daerah dapat mencapai kemandiriannya. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya sendiri untuk menghasilkan pendapatan sendiri guna membiayai semua pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa syarat suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu (1) suatu daerah harus melaksanakan kewenangannya dan mampu mengelola potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk mendanai proses penyelenggaraan urusan pemerintahannya dan (2) ketergantungan terhadap bantuan pemerintah Pusat harus seminimal mungkin, diharapkan PAD dapat menjadi sumber utama pendapatan daerah sehingga peran pemerintah daerah menjadi lebih besar (Mukhtaruddin dkk. 2023).

### 2.1.3 Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan

jadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang mencakup urusan urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau



bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja kategori wajib merupakan urusan pada tingkat paling dasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat oleh pemerintah daerah. Belanja ini diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup yang meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mewujudkan kinerja yang sesuai dengan standar. Belanja untuk kategori pilihan meliputi kegiatan pemerintah dengan fokus utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi keunggulan masing-masing daerah (Mukhtaruddin dkk. 2023). Berdasarkan PSAP No. 2, Mengatakan bahwa seluruh pengeluaran dari rekening kas Negara itu akan mengurangi saldo anggaran per periode. Sedangkan menurut PEMENDAGRI No.21 tahun 2011 belanja daerah didefinisikan dengan pengurangan nilai kekayaan bersih pada suatu daerah. PP No.71 Tahun 2010 mengatakan bahwa pelaporan keuangan dikelompokkan diantaranya: belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/belanja tak terduga, belanja transfer. Sementara itu, PP Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengelompokan belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menjelaskan pendapatan yang dihasilkan dari pungutan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan sesuai dengan potensi masing-masing daerah, hal ini disebut dengan PAD. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki



an untuk mengelola potensi daerahnya sendiri dalam rangka kan kemandirian daerah sesuai dengan desentralisasi dan otonomi

daerah untuk memperoleh pendapatan yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan potensi daerah ini antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2012). PAD ini dapat dijadikan tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam menyediakan dana dari dalam daerah dengan merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi suatu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan dana untuk membangun daerah yang berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian keuangan daerah (Junaidi dkk. 2018).

### **2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah (PP No. 33 Tahun 2004). DAU secara umum ditetapkan sebesar 26% dari total Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam RAPBN. Pembagiannya ditetapkan sebesar 10% untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabupaten/kota. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan perhitungan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan PAD dan dana bagi hasil. DAU berperan sebagai penyeimbang keuangan antar daerah sesuai dengan pertimbangan fiskal dan kebutuhan fiskal masing-masing daerah (Linawati, 2019). Alokasi DAU untuk



ang memiliki potensi fiskal yang besar namun kebutuhan fiskalnya kecil mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang

memiliki potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskal besar akan menerima DAU yang relatif besar. (Amalia, 2017)

### **2.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih perhitungan antara realisasi komponen penerimaan anggaran dengan komponen pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya adalah seluruh kegiatan transaksi keuangan yang meliputi penerimaan, pembiayaan, pengeluaran dan sisa lebih/kurang realisasi anggaran kegiatan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diperoleh dari selisih lebih penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya dan dialokasikan untuk membiayai belanja langsung dan tidak langsung pada tahun berikutnya. Apabila APBD suatu daerah menghasilkan surplus yang berarti terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), maka dimungkinkan untuk menambah alokasi belanja modal pada periode anggaran berikutnya (Megasari, 2015).

SiLPA ini dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menggambarkan efisien atau tidaknya pengeluaran pemerintah daerah, karena SiLPA hanya akan muncul jika terjadi surplus pada APBD dan pada saat yang sama terjadi pembiayaan netto yang positif. Hal ini berarti komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran dan pembiayaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan membiayai pengeluaran-pengeluaran lain yang dengan akhir tahun anggaran belum terealisasi.



### 2.1.7 Kapasitas Fiskal

Berdasarkan PMK Nomor 119/PMK.07/2017 disebutkan bahwa kapasitas fiskal digunakan sebagai indikator untuk melihat mampu atau tidaknya suatu daerah dalam mengelola keuangannya yang diukur dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditetapkan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Perhitungannya didasarkan pada data realisasi pendapatan dan belanja.

Tingkat kapasitas fiskal di suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin. Jika rata-rata penduduknya miskin, maka hal ini tidak akan meningkatkan tingkat penerimaan pajak daerah karena tidak mampu membayar pajak. Hal ini berdampak pada kapasitas fiskal daerah tersebut menjadi rendah, karena daerah tersebut kurang mampu menyeimbangkan kesejahteraan masyarakatnya. Apabila daerah memiliki kapasitas fiskal yang rendah, maka daerah tersebut akan diberikan transfer dalam jumlah yang relatif besar oleh pusat dengan tujuan agar daerah tersebut dapat menyamaratakan kesiapan fiskal antar daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah (Urip & Indahyani, 2017).

### 2.1.8 *Flypaper effect*

*Flypaper effect* merupakan suatu kondisi stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Iskandar, 2012). Dollery & Worthington (1995) menyebutkan bahwa seorang peneliti bernama Louise Marshall mengaitkan istilah *flypaper effect* dengan observasi yang menyatakan *'money sticks where it hits'*. Hal tersebut dianalogikan dengan



mekanisme dana transfer dari pemerintah pusat ke sub pemerintah di bawahnya. (Agussalim dkk. 2022).

*Flypaper effect* itu sendiri merupakan respon yang tidak simetris atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat. Imam (2021) menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan dana transfer (grants) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain *flypaper effect* merupakan kondisi dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dalam merespon pengeluaran daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Rafi dan Arza (2023) melakukan penelitian untuk menganalisis dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah terjadi *flypaper effect* di pemerintah daerah di Sumatera Barat. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia selama periode tahun 2016-2020. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan SiLPA memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dan tidak terdapat fenomena *flypaper effect* yang teramati pada pemerintah daerah di Sumatera Barat.

Ramadhani dkk. (2022) meneliti tentang pengaruh dan keberadaan flypaper terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit di 11 pemerintah



provinsi yang terletak di Indonesia Timur dari tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan E-views untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Khusus yang tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu, di Indonesia Timur terdapat fenomena *flypaper effect*. Implementasi kebijakan otonomi daerah masih perlu ditingkatkan. Pemerintah pusat perlu memotivasi potensi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dan mempertimbangkan untuk menyesuaikan kebijakan itu sendiri.

Riduwan (2021) membahas analisis dampak Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, serta fenomena *Flypaper effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama periode 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa tidak terjadi *Flypaper effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama periode 2016-2019.

Susan dkk. (2023) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dan tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi *Flypaper effect* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022. Sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sikka selama tahun anggaran 2018-2022, data yang merupakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa



secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien Dana Perimbangan lebih besar dari koefisien Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi *Flypaper effect* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka selama Tahun Anggaran 2018-2022

Kesuma dkk. (2022) meneliti tentang pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah, melihat apakah terdapat *Flypaper effect* terhadap Belanja Daerah, dan implikasinya terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Populasi penelitian ini adalah LRA di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2019 dengan menggunakan metode sampling jenuh dan 85 satuan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. dan PAD, DAU, dan DAK secara bersamaan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Selanjutnya terjadinya *Flypaper effect* terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.



### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH. Namun disamping itu, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri yang dikenal sebagai PAD, pembiayaan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari pernyataan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan PAD dan DAU memiliki hubungan positif.

Fenomena *flypaper effect* mengilustrasikan respon pemerintah daerah terhadap pengeluaran sebagai dampak adanya penerimaan dana transfer khususnya pada *unconditional grants*. *Flypaper effect* ini merupakan kondisi dimana proporsi dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya lebih banyak bersumber dari dana transfer daripada dana milik pribadinya. Penerimaan Dana Transfer oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai keseimbangan fiskal menyebabkan pemerintah daerah secara konsisten lebih memprioritaskan peningkatan pengeluaran daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) daripada menggunakan dana yang diperoleh dari peningkatan pendapatan mandiri daerah. Meskipun DAU efektif dalam meningkatkan pengeluaran untuk barang publik, namun, kenyataannya, tidak menggantikan pajak daerah, dan fenomena ini dikenal sebagai *flypaper effect*.

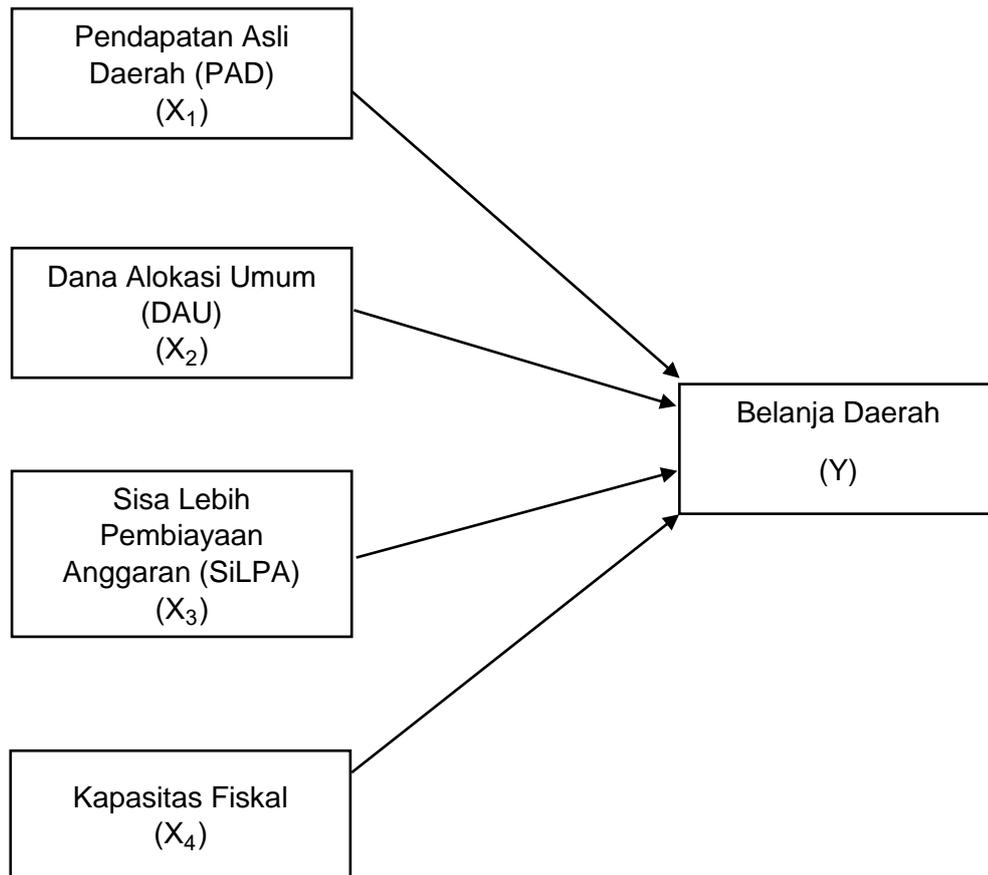
*Flypaper effect* tidak direpresentasikan dalam kerangka konseptual karena fenomena ini terjadi ketika pemerintah daerah lebih cenderung menanggapi peningkatan Belanja Daerah dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk

ikan adanya fenomena *flypaper effect* ini, maka penelitian ini akan variabel-variabel antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ),



Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ( $X_3$ ), Kapasitas Fiskal ( $X_4$ ), yang memengaruhi Belanja Daerah (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari pemaparan tersebut maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan yang sifatnya sementara mengenai suatu hal yang dianggap benar, atau bisa juga disebut sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini antara lain.



#### 2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Dalam konteks teori agensi, penggunaan PAD oleh pemerintah daerah untuk belanja dapat dipandang sebagai pengambilan keputusan agen (pemerintah daerah) atas dana yang sebenarnya dimiliki oleh principal (warga atau pemilih). Melalui pemahaman konsep teori agensi, Pemangku kepentingan (stakeholder) dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa penggunaan PAD oleh pemerintah daerah untuk Belanja Daerah benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

Penelitian Rafi dan Azra (2023) menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah. Temuan serupa juga telah dikonfirmasi dalam penelitian Oktavianti (2022), dan Ramadhani dkk. (2023) yang turut menegaskan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan tren penelitian ini, dapat diasumsikan bahwa adanya konsistensi dalam menunjukkan bahwa PAD memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan Belanja Daerah, menekankan pentingnya sumber pendapatan lokal dalam mendukung kebijakan pengeluaran pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Apabila PAD memiliki tingkat kategori tinggi, maka akan memengaruhi besar kecilnya tingkat belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hal ini berarti dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah. Sebaliknya, jika PAD memiliki

kategori yang rendah, maka terdapat variabel lain selain hasil PAD yang mempengaruhi Belanja Daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hal ini berarti



terdapat fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah. Hipotesis yang diajukan adalah;

**H<sub>1</sub>:** PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

#### **2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan teori agensi berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dimana pemerintah pusat atau lembaga yang menyalurkan (DAU) kepada pemerintah daerah berperan sebagai principal yang memberikan sumber daya atau anggaran kepada agen, yaitu pemerintah daerah sebagai pelaksana mandat. Faktanya, hubungan antara DAU dan Belanja Daerah bisa menjadi subjek risiko agensi. Terdapat kemungkinan bahwa pemerintah daerah menggunakan DAU tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti pemborosan, pengalihan dana, atau penyalahgunaan dalam kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Penelitian Kesuma dkk. (2022), disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Temuan yang serupa juga diperkuat oleh hasil penelitian Rafi dan Azra (2023). Meskipun demikian, hasil penelitian Agussalim dkk. (2022) menunjukkan perspektif berbeda dengan menegaskan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan dalam penelitian ini mengenai dampak Dana Alokasi Umum terhadap pengeluaran pemerintah daerah, menyoroti pentingnya kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah.



Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan bersifat unconditional grant atau transfer tanpa syarat. Artinya, pemerintah pusat memberikan fleksibilitas penuh kepada pemerintah daerah untuk menggunakan DAU sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing. Pemberian grant ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial agar pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi yang telah didesentralisasikan. Hipotesis yang di ajukan adalah;

**H<sub>2</sub>:** DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

#### **2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah**

Dalam konteks pemerintahan daerah, SiLPA bisa menjadi subjek dalam teori agensi karena menggambarkan bagaimana pemerintah daerah sebagai agen mengelola kelebihan anggaran yang seharusnya dimiliki oleh principal, yaitu masyarakat atau pemilik kepentingan. Teori Agensi menyoroiti risiko bahwa pemerintah daerah mungkin menggunakan SiLPA secara tidak efisien atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penggunaan SiLPA yang tidak tepat dapat mencakup pengalihan dana untuk kepentingan politik, penggunaan yang tidak produktif, atau penyalahgunaan anggaran.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafi dan Azra (2023), terungkap bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan Belanja Daerah. Dukungan terhadap

ni juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2016), ragan tegas menyatakan bahwa SiLPA memiliki dampak yang positif



terhadap Belanja Daerah. Temuan serupa dari kedua penelitian ini memberikan konfirmasi yang kuat terhadap pentingnya peran SiLPA dalam memengaruhi Belanja Daerah, menunjukkan adanya keterkaitan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

SiLPA memiliki peranan penting karena dapat diperuntukkan untuk beberapa tujuan yang mendukung keseimbangan fiskal dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah. Pertama-tama, SiLPA dapat diarahkan untuk menutupi defisit anggaran yang mungkin terjadi selama periode tersebut. Selain itu, SiLPA juga dapat dijadikan sumber dana untuk melaksanakan berbagai belanja pada tahun berikutnya, membantu memastikan kelangsungan program-program pemerintah tanpa mengandalkan pendanaan yang baru. Selanjutnya, SiLPA juga dapat dipergunakan untuk membiayai kewajiban lainnya yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Maka dari itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak hanya mencerminkan saldo keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung stabilitas fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Hipotesis yang diajukan adalah;

**H<sub>3</sub>:** SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

#### **2.4.4 Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Daerah**

Dalam konteks teori agensi, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang sebenarnya dimiliki oleh warga atau masyarakat, yang merupakan pemilik sejati sumber daya tersebut. Teori agensi menyoroti adanya potensi konflik kepentingan antara pihak yang terlibat dalam alokasi dan penggunaan kapasitas fiskal. Pemerintah daerah

memiliki kapasitas fiskal yang kuat mungkin memiliki kepentingan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara berbeda dalam belanja daerah



untuk mendukung agenda atau tujuan tertentu. Ini bisa bertentangan dengan kepentingan pihak lain, seperti otoritas fiskal pusat atau kepentingan kelompok masyarakat yang berbeda.

Penelitian Mukhtaruddin dkk. (2023) menegaskan terdapat hubungan positif antara Kapasitas Fiskal dengan Belanja Daerah, mengindikasikan bahwa kapasitas keuangan yang kuat berdampak positif pada alokasi dana untuk pengeluaran daerah. Temuan serupa juga telah terkonfirmasi dalam penelitian Urip dan Indahyani (2017) yang memberikan bukti tambahan bahwa Kapasitas Fiskal tidak hanya berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah namun juga menegaskan pentingnya ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mendukung kegiatan belanja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi cenderung memiliki sumber pendapatan yang kuat dari pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya. Hal ini dapat memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke belanja, termasuk untuk infrastruktur, layanan publik, dan pembangunan. Kapasitas fiskal yang tinggi bisa menciptakan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Ini dapat mengarah pada pengalokasian dana yang lebih baik, mengurangi pemborosan, dan pada akhirnya, meningkatkan ketersediaan dana untuk belanja daerah. Sejalan dengan penelitian Urip dan Indahyani (2017) menyatakan bahwa jika tingkat kapasitas fiskal suatu daerah rendah, berarti daerah tersebut mengalami fenomena *flypaper effect*, karena tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya dengan potensi daerahnya sendiri. Jika tingkat kapasitas fiskal daerah tinggi, berarti daerah tersebut tidak mengalami fenomena *flypaper effect*, karena mampu



membiayai kebutuhan daerahnya dengan potensi daerahnya sendiri. Hipotesis yang diajukan adalah;

**H<sub>4</sub>:** Kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **2.4.5 Analisis *Flypaper effect* terhadap Belanja Daerah**

Penerapan teori agensi pada *flypaper effect* menyoroti kompleksitas hubungan antara pemberi dana (prinsipal) dan penerima dana (agen), serta bagaimana insentif, kontrol, dan ketergantungan dapat memengaruhi penggunaan dana yang diberikan. Dalam konteks kebijakan publik, pemahaman mengenai *flypaper effect* dapat memengaruhi cara alokasi dana publik dan strategi pembangunan daerah. Prinsipal mungkin menetapkan persyaratan atau tujuan tertentu untuk penggunaan dana yang diberikan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan cara yang diinginkan prinsipal, tetapi *flypaper effect* menunjukkan bahwa dana tersebut lebih melekat pada tujuan awal dibandingkan dengan dana yang diperoleh sendiri oleh penerima.

Penelitian Oktavianti (2022) menegaskan bahwa terdapat fenomena *flypaper effect* yang memengaruhi belanja daerah, menandakan bahwa adanya peningkatan dana publik cenderung secara proporsional digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengeluaran. Temuan serupa juga terdokumentasikan dalam penelitian Susan dkk. (2023), yang menguatkan adanya kecenderungan ini dalam kebijakan belanja daerah. Namun, hasil penelitian Rafi dan Azra (2023) justru menyatakan bahwa tidak ada indikasi terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah, menunjukkan perbedaan interpretasi terhadap bagaimana

dana publik memengaruhi pengeluaran pemerintah daerah antara lain yang dilakukan.



Fenomena *flypaper effect* terjadi saat pemerintah daerah memberikan respon dengan melakukan belanja daerah semakin banyak atau terlalu boros dengan menggunakan DAU daripada PAD. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk menghabiskan dana perimbangan yang diperolehnya untuk mencukupi kegiatan-kegiatan di daerahnya. Hal ini dapat didasarkan oleh anggapan pemerintah daerah bahwa pemerintah pusat tidak memberikan syarat tertentu dalam penggunaan DAU, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk melakukan belanja daerah yang bersumber dari DAU. Dengan semakin besarnya belanja daerah yang bersal dari DAU dibandingkan dari PAD, maka mendorong terjadinya *flypaper effect* (Linawati, 2019). Fenomena *flypaper effect* dianggap dapat meningkatkan Belanja Daerah, hal ini karena tingkat sumber pendanaan daerah meningkat karena adanya dana transfer dari pemerintah pusat. Dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya daerah tidak dilakukan secara optimal, sehingga bisa dikatakan Pemerintah Daerah tidak mandiri dalam mengelola keuangan yang bersumber dari PAD untuk mendanai kebutuhan belanja di daerah sendiri. Hipotesis yang diajukan adalah;

**H<sub>5</sub>:** Terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

